

SOSIAL-BUDAYA: HARMONISASI AGAMA DAN BUDAYA DALAM PENDIDIKAN TOLERANSI

Yunus

Universitas Pamulang (UNPAM), Indonesia

Nurhang542@gmail.com

Mukhlisin

Universitas Pamulang (UNPAM), Indonesia

dosen01226@unpam.ac.id

ABSTRAK

Tana Luwu dihuni oleh komunitas multietnis seperti Bugis, Makassar, Rongkong dan Toraja. Beragam suku, kepercayaan, dan agama yang berbeda. Mereka hidup rukun bersama, mengatasi kerjasama dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga kegiatan keagamaan telah membentuk pemahaman tentang toleransi dalam beragama, yaitu saling menghormati dan menghormati pemeluk agama. Kota Palopo memiliki beberapa kearifan lokal antara lain; *Sipakatau* artinya saling memanusiakan, *Sipakalebbi* artinya saling menghormati, *Sipakaingge* 'artinya saling mengingatkan. Hal ini harus dijaga dan disosialisasikan agar menjadi perekat kreasi dan pemeliharaan umat beragama di Kota Palopo. Pembelajaran kearifan lokal budaya Bugis UNANDA dan IAIN Palopo yang menunjukkan bahwa pembelajaran menciptakan kesadaran empati (Pesse) terhadap orang lain yang memiliki identitas pribadi dan budaya yang berbeda. Kearifan lokal, pembinaan aspek afektif seperti sikap, minat, konsep diri, pengembangan nilai, dan moral diperlukan dalam masyarakat majemuk sehingga dapat memberikan makna belajar bagi peserta didik.

Kata Kunci: Budaya Bugis, Toleransi, Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

Konflik bernuansa suku, agama ras dan antar golongan (SARA), sesungguhnya merupakan salah satu tipe konflik yang tak mudah untuk diuraikan terlebih lagi konflik agama, namun bukan berarti konflik tersebut tidak bisa dikelola dengan baik. George Weige, memberi penilaian agama secara seimbang, menurutnya, agama dapat menjadi sumber konflik, di saat yang sama juga memiliki potensi kreatif yang dapat berfungsi sebagai jaminan yang kuat untuk menciptakan toleransi, pluralisme, demokratis, dan menjadi sebuah resolusi konflik nir-kekerasan (George Weige, 1992). Hal ini dapat terwujud, apabila adanya kesediaan dari pemeluk agama untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya secara mendalam, dewasa, toleran, dan pluralis (R.S. Appleby, 2000).

Perlibatan nilai-nilai kearifan lokal sangat diperlukan sebagai sarana pendukung dalam usaha menciptakan solidaritas sosial, mengawetkan, serta mengalih-generasikan budaya sehingga dapat meminimalisasi konflik sosial Wasisto (Raharjo Jati, 2013). Dengan demikian, lingkungan sosial jugalah yang menentukan bagaimana agama itu menjadi instrumen yang menggerakkan masyarakat. Sementara masyarakat Bugis, agama menjadi alat untuk menjaga kelangsungan lingkungan. Kesadaran ini diturunkan oleh generasi sebelumnya dengan menekankan kepada sikap etik keagamaan terhadap penjagaan lingkungan (C. Ramble, 2008). Begitu juga di Nepal, lingkungan dapat terjaga dan dijadikan sebagai sandaran hidup bagi masyarakat karena adanya faktor agama yang senantiasa mendukung kampanye pelestarian lingkungan (S. Stevens, 1997), (P. West, 2006), (Ismail Suardi Wekke, 2016).

Penanaman kesadaran akan dimensi multikultural di tengah masyarakat yang plural dan multikultural melalui pendidikan menjadi urgen sebab pendidikan merupakan pintu masuk potensial untuk menanamkan apresiasi terhadap adanya keragaman baik karena latar belakang suku, agama, jenis kelamin, dan latar belakang ekonomi keluarga dan lain-lain di kalangan mahasiswa (M. Amin Abdullah, 2007). Hal ini yang kemudian telah melahirkan perspektif pluralisme dalam pendidikan.

Budaya merupakan unsur-unsur yang sangat terkait dengan kehidupan manusia karena hakikat manusia sebagai hamba dan sebagai

makhluk sosial. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia terkenal dengan keragaman agama serta kebudayaannya. Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu merupakan agama yang resmi diakui di Indonesia (Diah Aghsari dan Ismail Suardi Wekke, 2015).

Budaya cenderung melarang seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Pelanggaran atas larangan tersebut mengakibatkan adanya konsekuensi yang berat bagi pelanggar. Implementasi budaya *siri>* dalam diri setiap pengelola pemerintahan maupun masyarakat dapat membantu meningkatkan kepatuhan pengawai terhadap regulasi pemerintahan sehingga efektivitas sistem pengendalian internal pemerintahan dapat tercapai (M. L. Marzuki, 1995). Meski sebagian besar masyarakat modern menganggap implementasi budaya tersebut merupakan suatu hal yang ketinggalan zaman, namun bagi masyarakat yang masih melestarikan budaya tersebut menganggapnya sebagai salah satu aturan yang paling efektif dalam mencegah seseorang untuk berbuat penyimpangan.

Wujud kebudayaan orang Bugis dapat dilihat dalam *pangngaderreng* (Nurhayati Rahman, 2006) yang terdiri dari empat unsur (*ade'*, *bicara*, *rapang* dan *wari'*) kemudian *sara'* setelah Islam diterima sebagai agama resmi dan umum dalam masyarakat Bugis (Mattulada, 1983), (Pelras, 2005), (Patmawati, 2014), (Kusumayanti, 2007), (Patmawati, 2016). Nilai keagamaan (Islam) merupakan nilai tertinggi yang amat dihormati oleh segenap masyarakat Bugis. Kepemilikan terhadap agama Islam melahirkan sebuah istilah “Bukan Bugis kalau tidak beragama Islam. Maka, fragmen sejarah ini kemudian menjadi karakter penting bagi orang Bugis.

Islam dan budaya bagi masyarakat Sulawesi Selatan merupakan masalah fundamental dan asasi. Fundamental karena setiap umat beragama harus memiliki keimanan, dan asasi karena ia menjadi dasar keberagaman. Bagi kaum beriman, agama dan budaya adalah hulu segala kehidupan (Haryono, 2005), (Kranti, 2014). Sedemikian urgennya masalah keimanan sehingga ia menjadi awal bagi setiap orang yang hendak menganut suatu agama (Nurcholis Madjid, dkk, 2005).

Tradisi fiqih, hubungan antar agama dan budaya, muslim dan non-muslim, belum memperoleh penyelesaian secara adil karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu (1) fiqih ditulis dalam masa dimana hubungan antara muslim dengan non-muslim tidak begitu kondusif, (2) fiqih ditulis dalam situasi internal umat Islam yang tidak begitu solid, dan (3) adanya simbol-simbol keagamaan yang secara implisit menganjurkan sikap keras terhadap agama lain (Mun'im A. Sirry (ed.), 2004).

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa masyarakat Luwu/Palopo dibagikan 3 kelompok di antaranya: masyarakat Pesisir, masyarakat kota dan masyarakat pengunungan. Dalam berkomunikasi, mereka berbeda bahasa. Masyarakat pesisir menggunakan bahasa Bugis. Sedangkan masyarakat pengunungan di Kota Palopo dalam berkomunikasi menggunakan bahasa *Tae*, secara budaya lebih cenderung ke bahasa Suku Toraja dan masyarakat perkotaan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.

Kota Palopo merupakan kota yang berada provinsi Sulawesi Selatan penduduk dan agamanya sangat majemuk. Kota Palopo penduduknya bermacam suku seperti suku Bugis, Toraja, Jawa, Bali, Madura, Sunda dan agama yang bermacam pula seperti Islam, Nasrani, Hindu, Budha. Leonar menambahkan bahwa suku Jawa, Sunda dan Bali merupakan angkatan transmigrasi di tahun 1980-an serta pada masa penjajahan merupakan tenaga rodi Belanda di tahun 1930-an yang hingga kini menjadi penduduk tetap yang ikut membangun dan memajukan daerah Luwu (Jennifer, 2007).

Walaupun orang sering mengatakan bahwa Luwu termasuk suku Bugis, tetapi orang-orang Luwu itu sendiri menyatakan mereka bukan suku Bugis, tetapi orang Luwu. Tentu sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat di Kota Palopo. Beragamnya masyarakat di Kota Palopo, maka dibutuhkan upaya untuk melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan agama. Pembaharuan secara strategis (konsep dan teknis) harus selalu digaungkan secara terus menerus, mengingat peserta didik adalah manusia yang sangat dinamis dan unik. Kemajuan teknologi dan informasi yang tidak bisa terelakkan. Maka dibutuhkan konsepsi

pendidikan agama yang menjadikan peserta didik berkarakter terbuka, toleran, inklusif, dan pluralis. Tentu ini tidak mudah, begitu banyak rintangan dan halangan bisa saja menjerat ide tentang pembaharuan pendidikan agama ini.

Menurut Bhikhu Parekh (2018) pendidikan pluralisme adalah pendidikan dalam kebebasan, terbebas dari segala macam prasangka, bebas untuk mengeksplorasi serta belajar dari budaya dan perspektif lain di tengah masyarakat yang multikultural. Sejalan dengan Parekh, Muslimin (2018) berpendapat, bahwa pendidikan pluralisme adalah pendidikan yang mengedepankan perubahan perilaku, sikap, serta kualitas karakter seseorang, dengan model pendekatan pembelajaran yang tidak sekadar mentransfer ilmu atau pengetahuan, melainkan juga harus menyentuh hati, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat mengambil keputusan terbaik buat dirinya dan lingkungan sekitarnya. Pluralisme agama, di samping bertujuan untuk memperteguh keyakinan keagamaan peserta didik, pendidikan ini juga mengorientasikan penanaman rasa empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama, baik muslim maupun non-muslim.

Gagasan pemikirannya pendidikan pluralisme sebenarnya lahir atau bersumber pada penghormatan hak dasar setiap individu terhadap kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Pendidikan pluralisme agama, selain menjadi prinsip-prinsip universalisme, kebebasan, kesetaraan (Bielefeldt, 2013), rasionalisme, humanisme transnasional, nilai-nilai global (Masud, 2002), peradaban, kasih sayang dan keindahan (Abdul Rozak 2015). Pluralisme agama juga merupakan hak prerogatif Tuhan (Rachman, 2011). bahkan *sunnatulla>b* (Hakim, 2006). Namun pluralisme agama saat ini masih dipandang sebagai paham yang tidak berasal dari Islam. Sehingga terjadi saling fitnah dan adanya ketidakharmonisan antar umat beragama, seperti; tuduhan liberal, sekuler, dan westernisasi.

Agama dan adat dalam masyarakat Kota Palopo memiliki posisi yang khas. Pergulatan pemikiran Islam Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari aspek adat sebagai bagian penting. Sebagaimana kajian Adlin Sila di masyarakat Jawa bahwa tidak memungkinkan untuk melakukan klaim Islam di Indonesia dengan hanya semata-mata melihat satu suku atau etnis

saja (Kamaruzzaman, 2011), (Sheetal R. 2006), (Watzlawik, 2012). Sementara, pola perjumpaan adat dan Islam menemukan bentuk dalam beberapa gambaran seperti di Minangkabau yang mengalami konflik antara keinginan untuk mempertahankan adat dengan penerimaan Islam sebagai agama dan jalan hidup (Adlin Sila, 2011). Adapun dalam tradisi Aceh adat berjalan paralel dengan praktik beragama (Taufik Abdullah, 1966), (Za'im Rais, 1994). Ini menunjukkan adanya proses transformasi agama ke dalam adat dengan respon yang berbeda-beda (Stephen Todd dan Andrew Steele, 2006).

Khaled Abou el-Fadl, berpendapat, bahwa semangat toleran dan pluralis dari para penganut agama akan menentukan corak pemahaman teks suci agama tersebut secara toleran (Khaled Abou el-Fadl, 2002), (Ibrahim Kali>n, "2009), (Saleh Saidi et 2002). Peran para tokoh agama dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada para penganut agama menjadi sangat signifikan, apakah pemahaman yang diberikan itu eksklusif ataukah inklusif. Selanjutnya, berbagai pandangan tentang pentingnya toleransi, terimplementasi dengan baik di Kota Palopo, sehingga ketegangan semakin berkurang, dan peran pemerintah Kota Palopo begitu *intends* dalam menyosialisasikan serta memberi pemahaman tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai dalam keragaman melalui pemanfaatan pranata-pranata sosial, seperti; kebudayaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, terlebih lagi jika dilihat dari sejarahnya, suku Toraja (Kristen) dan Islam di Tana Luwu (Kota Palopo) sangat menjunjung toleransi beragama dan bermasyarakat.

Model pendidikan toleransi di perguruan tinggi menjadi bagian penting untuk mengembangkan pendidikan karakter mahasiswa (Dasim 2010). Dalam hal ini setidaknya ada tiga model atau pendekatan yang dapat dilakukan yaitu: Pertama, pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas perkuliahan Islam dan kearifan lokal, Pendidikan Agama, kearifan lokal keluwuan bahkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan diarahkan bagaimana mahasiswa menjadi aktif dan dapat meningkat melalui tahapan pembelajaran dengan mendorong dan membangkitkan nilai-nilai karakter yang tentunya diharapkan akan muncul

dari mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan jika pada tahapan perkuliahan Pendidikan Agama Islam, ISD/IBD, pendidikan multikultural arahnya kepada pengembangan potensi mahasiswa.

Kedua, pendidikan karakter melalui layanan bimbingan dan konseling baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, serta diarahkan bagaimana seorang mahasiswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan selanjutnya masalah orang lain dengan tumbuhnya kesadaran akan segala potensi yang dimilikinya, semua itu dilakukan dengan tujuan agar mampu mengembangkan kepercayaan diri mahasiswa untuk maju dan berkembang. Ketiga, pendidikan karakter melalui kuliah kerja nyata.

Wacana pluralisme dikenal istilah teologi inklusif. Teologi ini secara umum dapat diungkapkan sebagai pandangan yang memandang adanya kebenaran dalam agama-agama lain. Meski tetap dalam keadaan memeluk agamanya (Maria Ulfa, 2013). Sikap yang didasarkan pada inklusivisme berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran. Meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya (George, 2000). Sikap inklusif inilah yang harus menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Sebab dengan pendidikan tentu diharapkan akan lahir generasi penerus bangsa yang menghargai kemajemukan. Upaya ke arah pembentukan karakter mahasiswa yang inklusif dan toleran harus senantiasa digalakkan.

MASYARAKAT BUGIS

Masyarakat Bugis secara tradisional, telah diatur oleh norma-norma dan moralitas masyarakatnya, yang diinternalisasikan dalam konteks budaya dan kearifan lokal, baik melalui cerita rakyat maupun melalui tradisi lisan seperti *Pappaseng* dan *Elong Ugik*. Tata krama berperilaku antar masyarakat Bugis dalam bentuk komunikasi verbal sudah lama hidup dan terealisasikan hingga sekarang, meskipun harus dipahami bahwa segenap perilaku berbahasa santun nan beretika bersifat relatif, bergantung pada faktor sosial-budaya dan hubungan keakraban penutur dan mitratutur

Perilaku berbahasa santun senantiasa dibangun oleh unsur-unsur bahasa yang berfungsi afektif. Unsur-unsur tersebut terefleksikan melalui

penggunaan pemarkah linguistik, seperti penggunaan kata sapaan, deiksis, honorifik, partikel penegas, hedges dan sebagainya. Secara umum, bentuk pemarkah kesantunan linguistik tersebut hampir terealisasi pada semua jenis tindak tutur, baik yang diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Azyumardi Azra (2005), bahwa kebijakan dan kearifan lokal untuk secara toleran melihat perbedaan dan keragaman tidak bisa datang dan tumbuh sendiri, melainkan harus ditanamkan dan dikembangkan melalui pendidikan agama yang memegang prinsip pluralisme agama yang tinggi dan multikulturalisme. Penanaman nilai pluralisme agama dalam pendidikan agama adalah bagian penting dari perumusan untuk meneguhkan penghargaan, terhadap identitas dan keyakinan kebenaran agama lain. Hal ini penting dilakukan karena selama ini lembaga pendidikan formal, terkesan mengajarkan pendidikan agama dengan semangat misionaris dan dakwah (*confessional approach*) (William 1997). Oleh karena itu, penting adanya reorientasi pendidikan agama yang mengakomodasi semangat penghargaan terhadap agama lain.

Reorientasi pendidikan agama dapat dilakukan dalam empat kriteria yaitu *Pertama*, melakukan transformasi dari studi agama ke studi religiusitas. *Kedua*, memasukkan kemajemukan terutama kemajemukan agama. Sebagai bagian dari upaya memperkaya pengalaman beragama. *Ketiga*, lebih menekankan pada pembentukan sikap toleran dan penghargaan kepada agama lain. *Keempat*, dalam pengajaran ilmu-ilmu keagamaan perlu diuraikan dimensi historis dari doktrin-doktrin keagamaan tersebut (Naim, 2008).

Model pembelajaran pluralisme yang hanya menekankan kebenaran agamanya sendiri dan ketidak-benaran agama lain. Seharusnya direkonstruksi ulang. Konsepsi pemahaman yang biner seperti iman kafir, muslim non muslim, dan baik benar. Yang sangat berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap agama lain misalnya mau tidak mau harus ‘dibongkar ulang’. Agar sekelompok penganut agama tidak lagi memandang agama lain. Sebagai agama yang ‘salah’ dan tidak ada jalan keselamatan kecuali dalam agama yang diyakininya (Isnain, 2018).

Kegagalan dalam menumbuh kembangkan sikap toleran dan inklusif dalam pendidikan agama. Hanya akan melahirkan sayap radikal dalam beragama. Meminjam filsafat pendidikan Paulo Freire (2007). Sudah saatnya pendidikan agama diarahkan pada arena pembebasan dari belenggu doktrin-doktrin agama yang eksklusif dan intoleran. Menuju formulasi pendidikan agama yang inklusif. Karena sejak awal pendidikan harus diarahkan untuk proses kemerdekaan, bukan menjinakkan budaya yang serba eksklusif. Sebab cara pandang atau pemahaman teologis yang ekslusif dan intoleran yang demikian. Pada gilirannya akan dapat merusak harmonisasi agama-agama dan menghilangkan sikap untuk saling menghargai kebenaran dari agama lain.

Menurut Azyumardi Azra (2007), untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama dan menciptakan suasana inklusif dalam beragama. Maka dibutuhkan kemampuan dari setiap kelompok keagamaan. Untuk mendalami pemahaman *mutualitas* doktrin-doktrin dan praktik-praktik kelompok keagamaan lain sebagai prioritas pertama. Hal ini dilakukan sebagai pendalaman terhadap pengenalan kemajemukan terhadap aspek tafsir ajaran keagamaan. Posisi pemahaman mutual ini bagi penulis memungkinkan terciptanya pemahaman keagamaan yang inklusif. Pendidikan pluralisme sejatinya harus membangun visi pendidikan yang mengembangkan aspek tersebut di atas.

Kurikulum pendidikan yang toleran-pluralis perlu diterapkan sejak dini. Supaya peserta didik terbiasa dengan keragaman dan perbedaan. Dan mampu menyikapi kemajemukan dan perbedaan itu dengan sikap “dewasa”, *peacefully* (damai), nir-kekerasan, *wise* (bijaksana), dan *civilized* (beradab). Keterbukaan menjadi kata kunci sekaligus pra-syarat *religious encounter* yang sehat dan dinamis serta jalan terciptanya perdamaian global antar umat beragama (Al Qurtuby, 2011). Karena pendidikan pluralisme menekankan pada pendidikan humanis, yaitu; bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi dan antar pribadi dengan kelompok di dalam komunitas.

Model pendidikan seperti ini bertujuan tidak saja mengasah intelektual, tetapi juga menyelaraskan kecerdasan emosional, sosial dan spiritual, sehingga memberi keseimbangan pada setiap individu dari aspek

individualitas kepada aspek sosialitas yang melahirkan kepekaan dalam kehidupan bersama sebagai suatu sistem masyarakat sekolah atau masyarakat secara umum. Di samping itu, pendidikan lebih dari sekadar pengajaran, akan tetapi pendidikan merupakan suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu (Azra, 2002). Jadi, pendidikan pluralisme pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia supaya dapat menjadi manusia yang mandiri serta dapat berkontribusi terhadap masyarakat dan bangsanya.

Kaum pendidik diharapkan dapat memaparkan bahwa agama bisa ditransformasikan sebagai kekuatan penggerak perdamaian, persatuan, toleransi, dan pluralisme. Bukan sebagai motor penggerak kekerasan, perpecahan, dan anti-pluralisme seperti dilakukan kelompok militan-radikal agama. Di samping mengarahkan pada pendidikan humanis, pendidikan pluralisme juga mengarahkan pada pendidikan “damai”. Pendidikan damai sebenarnya adalah istilah lain dari pendidikan multikulturalisme. Menurutnya, multikulturalisme memberikan pengandaian akan adanya kesadaran bagi setiap komunitas dengan identitas kultural tertentu dan posisinya sebagai bagian dari harmoni kehidupan.

Multikulturalisme meniscayakan keragaman dan pluralitas dengan titik tekannya pada kesadaran akan keragaman. Jika pluralisme mengisyaratkan kesadaran dibangun atas individu dengan cita-cita ideal adanya *personal right* yang mengarah pada liberalisme dan masyarakat komunikatif, maka multikulturalisme dibangun atas dasar kesadaran kolektif, yaitu sebuah komunitas yang mengarah pada pembentukan masyarakat madani yang multi-etnis, keragaman agama dan identitas sosial yang lain, sehingga antara pemahaman pluralisme pasti akan mengarah kepada pemahaman multikulturalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu payung konsep yang meliputi beberapa format penelitian yang akan membantu memahami dan

menjelaskan makna fenomena sosial dari *setting* alamiah yang ada (Sharan B. Mariam, 1998). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnopedagogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan budaya yang tercermin dari modal utama dalam membangun relasi sosiologis di tengah umat yang berbeda agama dan budaya. Paling tidak inilah yang bisa dipahami dari komentar Ikram di atas. Kesadaran personal yang diterangi oleh sinar iman kebenaran, tentu akan melahirkan kesadaran sosiologis yang berimplikasi pada terciptanya hubungan yang harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda keyakinan. Pada kondisi ini akan tercipta *strengthening at the micro-level of society* (Sheila C. Gordon dan Benjamin Arenstein, 2017).

sebuah kekuatan-pemahaman dalam wilayah mikro-sosial. Kekuatan pemahaman dan penerimaan tulus akan adanya perbedaan inilah yang menjadi modal besar untuk mengubah struktur sosial yang lebih luas dengan jangkauan yang massif.

Pendidikan budaya harus diselenggarakan dengan prinsip *the openness to reflect critically on one's own position.*¹ (Oddbjørn Leirvik, 2014, Nazia Islam, 2014). Prinsip yang mengedepankan keterbukaan secara kritis bagi setiap mahasiswa dalam memandang diri sendiri dan orang lain. Daya kritis tidak hanya dibutuhkan ketika diperhadapkan pada tradisi agama lain. Tetapi, berani dan jujur secara terbuka untuk melakukan *selfcritical* terhadap keyakinan diri sendiri adalah bagian penting dari pelaksanaan pendidikan lintas iman. Keberanian mengungkapkan kelemahan dan kesalahan beberapa oknum se-agama yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi dan golongan adalah bagian dari keterbukaan tanpa syarat. Ini bisa terjadi, jika seluruh ego dan emosi subjektivitas dalam beragama dapat ditekan dan diredam dengan penuh ketulusan dan rasa cinta. Semua melebur dalam keragamaan yang saling melengkapi.

Perubahan pemahaman mahasiswa dari yang tadinya penuh prasangka, lalu berubah menjadi penghargaan dan apresiasi positif terhadap tradisi budaya lain. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal

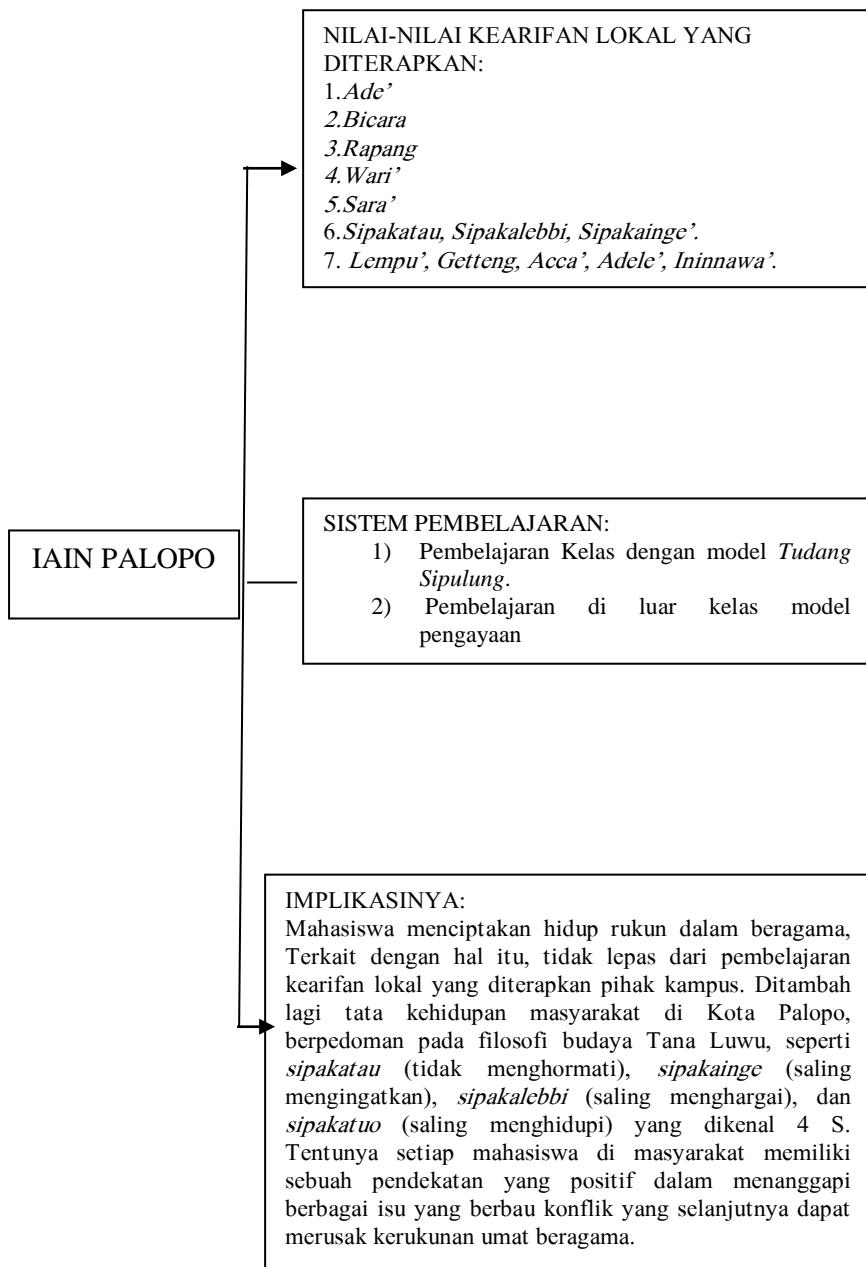
tidak memberi ruang bagi peserta didiknya untuk bisa melakukan konversi agama/budaya. Di sinilah pentingnya penguatan “budaya”. Dalam hal ini Ikram menjelaskan, bahwa sebagian besar merasa beruntung mengikuti kuliah di IAIN Palopo, dan mereka mempunyai presepsi positif terhadap budaya Toraja dan Rongkong, Jawa bahkan Sasak (Abdul Hafid, 2016).

Di samping itu relasi budaya dalam dimensi visi misi IAIN Palopo adalah penguatan pada aspek personal, dengan meyakini bahwa budaya kita sama, bahwa dalam konteks ajaran sebagai sebuah “kotak makanan” tentu kita berbeda, tetapi pada aspek prinsipil dalam bentuk isi kotak tersebut adalah kita sama. Proses penghayatan iman dapat mencairkan kebekuan keberagamaan kita selama ini, tentu dalam hal ini kita harus banyak menghayati budaya dalam domain atau aspek spritulitas (Ikram 2019).

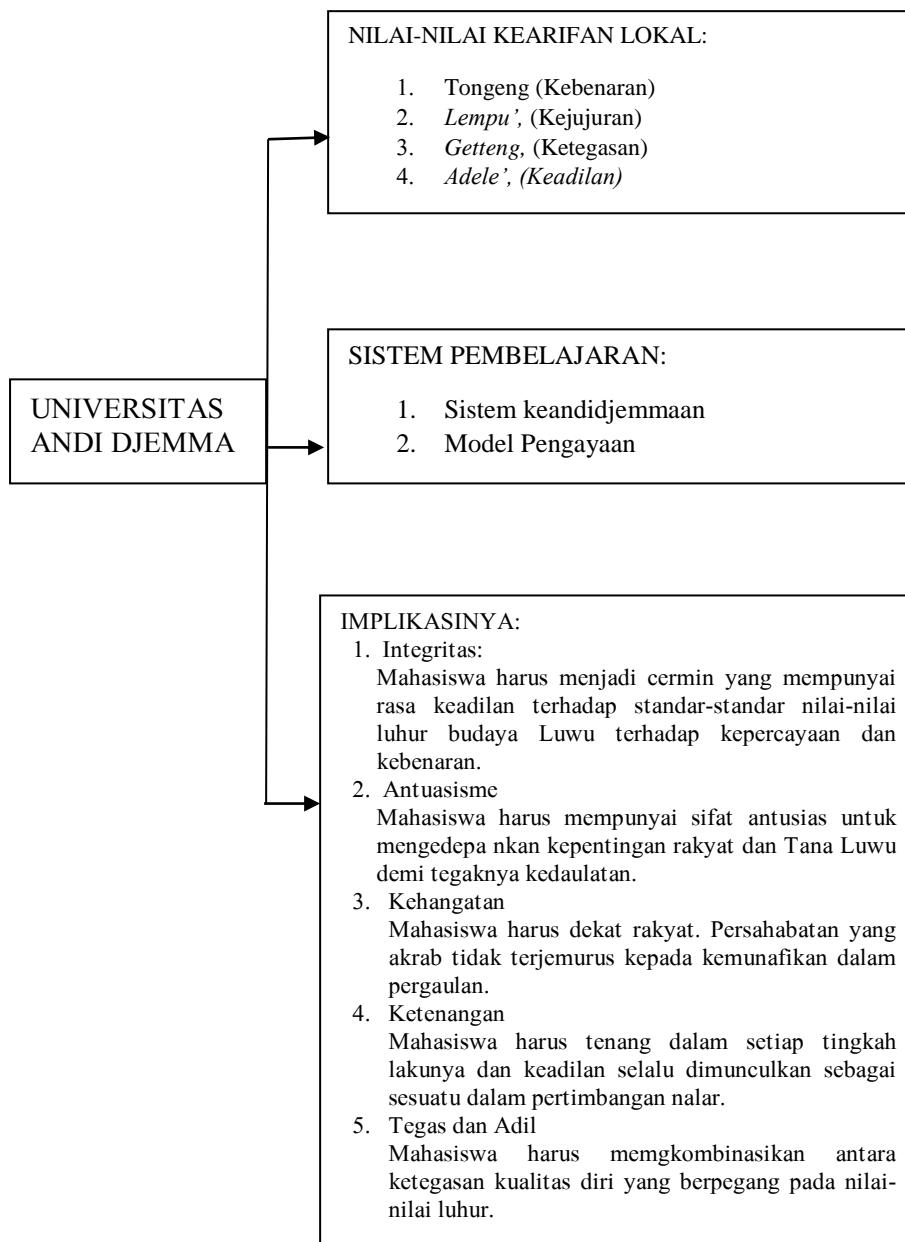
Pada aspek yang lain, seorang mahasiswa Veri Irawan UNANDA mengakui (Veri Iraman, 2019). Bahwa setelah ikut Universitas Andi Djemma (UNANDA), ia merasa bahwa budaya yang diyakininya harus lebih adaptip terhadap kenyataan sosial yang ada. Ia menjelaskan, bahwa saya menganggap dan merasakan program visi misi kampus yang berbasis kearifan lokal keluwuan ini adalah bagian dari rekreasi budaya, keimanan, dan pengalaman keberagamaan yang lain.

Orang-orang yang selama ini saya anggap orang cacat dan tidak memiliki fungsi sosial sedikitpun. Tapi setelah mengikuti kuliah di kampus UNANDA, saya lalu sadar bahwa disabilitas adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa disisihkan dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan berbudaya dan beragama saat ini. Kearifan lokal dan agama harus mengambil peran penting dalam melindungi dan menyapa kaum disabilitas (Veri Iraman, 2019). Adapun konsep kearifan lokal dalam dalam pembelajaran, sebagai berikut:

Tabel 1
Penerapan kearifan lokal budaya Bugis di IAIN Palopo



Tabel 2
Penerapan kearifan lokal budaya Luwu di UNANDA PALOPO



Prinsip pendidikan kearifan lokal diterapkan di kampus memang memberi pemahaman yang utuh kepada mahasiswa untuk bisa *deeply respects the cultural, faith, religious, or secular* (Carmody, 2010), senantiasa memperdalam respek dan perhatian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, agama, dan fenomena sosial. Pada sisi yang lain, komentar salah seorang lulusan UNANDA perlu menjadi perhatian. Ia mengatakan, bahwa adapun pengaruh secara sosial ini bisa dilihat dari lulusannya ketika mereka kembali ke masyarakat. Mereka bisa mengkampanyekan hidup damai di tengah-tengah perbedaan keyakinan di masyarakat. Menjadi penggerak terhadap kemajuan umat beragama, serta bisa menjadi penengah terhadap problem keagaman yang bisa berakibat terjadinya konflik antar agama dan budaya (Salwan 2019).

Mahasiswa menjadi penggerak terhadap kemajuan umat beragama serta penengah atas timbulnya gesekan keagamaan. Harus menjadi visi hidup kampus ini. Apa yang telah didapatkan selama mengikuti kuliah di kampus. Ini bisa menjadi bekal untuk membangun sinergitas antar umat beragama. Para alumni ini diharapkan tidak hanya sekedar melakukan *replicate-mereplikasi* ulang realitas sosial-budaya, tetapi, bisa melakukan *recreate-menata* ulang bangunan sosial-budaya yang cenderung tidak ramah terhadap adanya perbedaan budaya atau agama (Davies, 2017).

Toleransi beragama kedengarannya menjadi hal yang biasa saja. Tetapi, praktik pelaksanaanya kadangkala menghadapi berbagai macam kendala. Peran seorang muslim dalam bertoleransi dengan pemeluk agama lain seperti orang mahasiswa Seko dan saudara kita dari Tator (*Tau Toraja*). Islam, sebagaimana pemahaman tersebut, adalah Islam yang ramah. Islam yang memberi ruang bagi perkembangan agama lain untuk bisa tumbuh dan berkembang. Toleransi yang dipraktikkan ini sudah berwujud menjadi sikap inklusif dalam beragama. Hal inilah yang disebut sebagai *acknowledging differences* (Baidhawy, 2007). Pengakuan terhadap perbedaan. Tanpa harus terjebak pada penilaian benar atau salah terhadap keyakinan orang lain.

Konteks Indonesia, pandangan inklusif-pluralis Ibn ‘Arabi>, Ru>mi> dan al-Ji>li> dapat memperkokoh ke-bhinneka tunggal ika-an. Sebagai negeri yang mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia

dengan kenyataan kemajemukan (agama, budaya, etnis dan bahasa) tiada duanya, pandangan keagamaan yang moderat dan inklusif merupakan fondasi utama yang selalu dibutuhkan dalam bangunan keindonesiaaan yang majemuk. Secara teologis, ada nuktah yang amat penting di dalam al-Qur'an dan hadis yang memberi kebebasan kepada umat manusia untuk memeluk agama atau kepercayaan yang diyakininya. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, bahkan Nabipun ditegur jika memaksa seseorang atau komunitas untuk beriman kepada syariatnya.

Negara kita memiliki UUD 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa seseorang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakannya, beribadat menurut keyakinannya, dan bebas berserikat serta berkumpul. Pasal 28 E ini kemudian dikuatkan oleh pasal 22 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dimana negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk berkeyakinan dan beribadat menurut agamanya. Kedua pasal itu memiliki dua pengertian penting. Tak ada seorang pun, termasuk negara, yang berhak mengintervensi atau merampas kebebasan berkeyakinan karena ia merupakan pemberian (*given*) dari Tuhan. kedua pasal itu merupakan jaminan konstitusional bagi manusia Indonesia untuk memiliki agama atau kepercayaan yang diyakininya. Mestinya tidak boleh ada peraturan pemerintah atau daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tertinggi, yang menghambat atau mengekang kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Peran sosial-budaya seseorang tentu hanya bisa diukur dari sejauh mana ia bisa menjadi bermanfaat bagi kepentingan kemanusian. Agama tentu tidak bisa abai terhadap kenyataan sosial. Agama dan budaya harus mampu memberi solusi dan hadir menyapa fenomena tersebut. Sebab semua ajaran agama mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia. Tentu, tanpa harus mempertimbangkan status dan identitas manusia tersebut. Pendidikan kearifan lokal Bugis, paling tidak bisa merubah cara pandang para mahasiswa dalam melihat fenomena pluralis di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat pada dasar ketika berkumpul, saling menghormati, memiliki kesamaan dalam tujuan, kemaslahatan, dan keikhlasan untuk mencapai tujuan umum. Sementara menurut Berger dalam Damsar (2012),

masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya. Maksud dari keseluruhan kompleks itu adalah bahwa dalam dapat ditemukan bagian-bagian yang membentuk kesatuan. Secara objektif, masyarakat merupakan hasil tali-temali antara lingkungan alam, lingkungan sosial, serta karakteristik individu yang selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pergaulan ketiganya. Ketiganya selalu berkaitan antara satu dengan lain sehingga membentuk sebuah bangunan masyarakat yang dapat dilihat sebagai sebuah realitas sosial.

Selain fenomena di atas, faktor demografi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial pada masyarakat Kota Palopo, menjadi pintu gerbang masuknya pendatang dari beberapa wilayah dengan warna yang berbeda (agama dan budaya). Menyikapi hal ini, praktik pendidikan di perguruan tinggi selanjutnya menjadi agen sosialisasi budaya Kota Palopo dalam upaya menyosialisasikan kebudayaan melalui pendidikan, Azyumardi Azra (2003) berpendapat, perguruan tinggi memang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya bibit-bibit demokrasi. Dia menambahkan, bahwa pemeliharaan tradisi tidak diwariskan begitu saja, karena pola berpikir, tindakan, dan juga budaya demokrasi adalah sesuatu yang harus disosialisasikan, diajarkan, serta diaktualisasikan kepada generasi muda melalui jalur pendidikan.

Dengan demikian, sudah menjadi suatu yang umum—untuk tidak mengatakan wajib dan lumrah—perguruan tinggi ikut membentuk pola pikir, perilaku, dan budaya pada anak didik untuk selalu menghargai keberagaman. Lingkungan perguruan tinggi sedapat mungkin harus dijadikan tempat yang memungkinkan mahasiswa dapat membiasakan diri berada dalam kebersamaan tanpa mengorbankan kebhinekaan sebagai sesuatu yang bersifat asasi dalam diri manusia.

Selain berfungsi sebagai agen sosialisasi budaya, perguruan tinggi juga berfungsi sebagai sarana penanaman solidaritas sosial yang mengarah pada sikap saling percaya antar sesama warga dan bersama-sama mewujudkan demokrasi di Kota Palopo (Yunus, 2020). Menurut Putnam (1993) sikap saling percaya merupakan unsur modal sosial yang sangat penting. Demokrasi yang terbangun dalam masyarakat, interaksi sosialnya sangat kompleks. Kerjasama dan koordinasi dalam masyarakat hampir

tidak mungkin terwujud, jika hal itu hanya didasarkan pada pengetahuan dan kalkulasi rasional anggota masyarakatnya secara individual, karena individu memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan untuk membuat keputusan (Saipul 2007).

Sikap saling percaya (*trust*) membantu orang untuk memecahkan setiap masalah, dan karena kerjasama kolektif tersebut, memungkinkan komunitas untuk berinteraksi, sekalipun diantara mereka terkadang tidak memiliki kecukupan pengetahuan (Warren, 1999). Proses pendidikan di perguruan tinggi bertujuan untuk mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari budaya, berupa penghargaan hak-hak individu serta menumbuhkan semangat kerja.

Menurut penulis, dari sisi teologis wacana pluralisme dan budaya yang telah dirumuskan oleh tokoh-tokohnya masih relevan dan memadai untuk menjadi alternatif pandangan dalam memahami kenyataan kemajemukan. Dengan paradigma dan sikap pluralis, seseorang sejatinya memiliki pandangan dan sikap keagamaan yang otentik, sekaligus moderat dan bijak (humanis). Sikap bijak dan lapang dada juga mesti ditunjukkan kepada gagasan seseorang dan kelompok yang tetap menolak, apakah secara moderat atau ekstrem, wacana dan penghayatan terhadap pluralisme agama (Anis, 2005, Yunus, 2019).

Meski ada beberapa model atau varian, tetapi semuanya tak keluar dari bingkai tiga kategori populer, yaitu eksklusif, inklusif, dan pluralis. Dalam konteks hubungan di antara masyarakat dunia yang plural dan global saat ini, sejumlah intelektual menilai bahwa cara pandang eksklusif tak memadai untuk diterapkan. Pandangan eksklusif cenderung bersikap negatif dan merendahkan agama orang lain. Kaum eksklusif akan menolak prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan serta bentuk-bentuk manifestasinya. Karena itu, kelompok eksklusif, terutama yang ekstrem, memiliki potensi untuk menjadi malapetaka bagi kerukunan (harmoni) antar umat beragama, karena bagi mereka, perbedaan dianggap sebagai ancaman yang harus dimusnahkan ketimbang rahmat yang mesti disyukuri.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Kota Palopo, kesadaran akan pentingnya pemahaman pendidikan pluralisme agama yang

diselenggarakan dalam bentuk pendidikan informal dengan tujuan membentuk individu-individu yang toleran dalam keluarga dan lingkungannya yang multi-etnis dan agama, dilaksanakan melalui model pendidikan *etnopedagogi* (pendidikan berbasis kearifan lokal). Pendidikan berbasis *etnopedagogi* adalah sebuah praktik pendidikan berbasis kearifan lokal, yaitu; bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dan diwariskan melalui sarana kearifan lokal pada suatu daerah. Lebih jauh, kearifan lokal (*local wisdom*) berarti; pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas, dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Di samping itu, kearifan lokal juga dapat dimaknai sebagai sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang hidup di dalam masyarakat lokal (Suwardi 2010).

Bagi masyarakat di Kota Palopo sudah menjadi sebuah keharusan untuk merawat dan menjaga alam dengan bersih, rapi, indah, dan sehat, seperti; tidak menebang pohon sembarangan (*illegal logging*), pencemaran udara, pencemaran air, menata taman-taman agar terlihat menarik, dan lain-lain. Fenomena seperti ini menjadi sesuatu yang biasa terjadi (lumrah) pada masyarakat Tana Luwu pada umumnya(Yunus, Nurseha, 2020; Yunus, 2020).

Islam adalah agama yang bukan saja merupakan pedoman bagi manusia dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan atau supranatural (*hablum min Alla>h*), tetapi juga merupakan pedoman dalam mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablum min anna>s*) sekaligus juga memberikan pedoman dalam bersikap terhadap lingkungan alam (*hablum min al-'alam*) Nottingham, 1985), (Poloma, 1979). Jika dilihat dalam al-Qur'an— sebagai pedoman beragama bagi Muslim—sudah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia, bahwa ada dua sasaran penting yang hendak dicapai melalui pembangunan bidang agama, yaitu peran agama dalam proses pembangunan nasional dan peran agama sebagai pembinaan kerukunan hidup beragama. Dua sasaran ini saling berkait bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan sektor agama sebagai bagian pembangunan nasional,

merupakan sikap peduli pemerintah bersama masyarakat Indonesia terhadap pembangunan aspek spiritual, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai acuan operasional pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Indonesia sekaligus memberikan jaminan atau payung hukum akan aktivitas keagamaan.

Makna dalam menjalin hubungan baik dengan tuhan (*bablum min Alla>h*), menjalin hubungan baik dengan manusia (*bablum min anna>s*), dan menjalin hubungan baik dengan alam (*bablum min al-'alam*), yang dalam terminologi Tana Luwu dikenal dengan istilah *padaidi* di dalamnya ada unsur 4 S, meniscayakan, bahwa manusia selalu merindukan puncak keagungan dalam segala dimensi eksistensialnya. Menciptakan harmonisasi diantara tiga unsur ini merupakan “jalan ideal” spiritualitas yang memantapkan jiwa dan mengarahkan hidup agar tidak ambigu, fana, apalagi paradoks.

KESIMPULAN

Tana Luwu memiliki beberapa nilai-nilai kearifan lokal yang masih diterapakan di masyarakat *Sipakatau* artinya saling memanusiakan, *Sipakalebbi* artinya saling menghormati, *Sipakaingge* 'artinya saling mengingatkan. Hal tersebut harus dijaga dan disosialisasikan agar menjadi perekat kreasi dan pemeliharaan umat beragama di Kota Palopo. Mereka hidup rukun bersama, mengatasi kerjasama dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga kegiatan keagamaan yang telah membentuk pemahaman tentang toleransi dalam beragama, yaitu saling menghormati dan menghormati pemeluk agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sirry, Mun'im (ed.). 2004. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina, pp. 143.
- Abdullah, M. Amin. 2007. Kesadaran Multikultural: Sebuah Gerakan Interest Minimalization dalam Meredakan Konflik, dalam Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural*

- Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan.* Yogyakarta: Nuansa Aksara, pp. xix.
- Abdullah, Taufik. 1966. "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, No. 2. pp. 1.
- Abou el-Fadl, Khaled. 2002. *The Place of Tolerance in Islam*, (Boston: Beacon Press. pp. 23.
- Aghsari, Diah dan Ismail Suardi Wekke. 2015. Ritual Sasi Laut; Akulturasi Agama dan Budaya dalam Praktik Ritual Kebaharian Masyarakat Misool Raja Ampat, *Jurnal Kalam*, Vol. (1), Juni pp. 11.
- Appleby, R.S. 2000. *The Ambivalence of The Cared: Religion and Violence, and Reconciliation*. New York: Rowman and Littlefield, pp. 69.
- Al Qurtuby, Sumanto. 2011. "Pluralisme, Dialog, dan Peace building Berbasis Agama di Indonesia", dalam *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Democracy Project-Yayasan Abad Demokrasi. pp. 193.
- Azra, Azyumardi. 2003. "Pendidikan Multikultural, Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika", *Republika*, Rabu 3 September.
- 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas. pp. 4.
- 2005. *Dari Harvard hingga Mekkah*. Jakarta: Penerbit Republika. pp. 149.
- 2007. "Eksplorasi atas Isu-Isu Kesetaraan dan Kemajemukan: Hubungan antar Agama" dalam *Memahami Hubungan antar Agama*. Yogyakarta: eLSAQ Press. pp. 131.
- B. Grose, George dan Benjamin J. Hubbard. 2000. *Tiga Agama Satu Tuhan, Mizan*: Bandung.
- Budimansyah. Dasim dkk. 2010. *Model Pendidikan Karakter di Peguruan Tinggi: Penguanan PKn, Layanan Bimbingan Konseling, dan KKN tematik di Universitas Pendidikan Indonesia*. Bandung: UPI. pp. 11.
- Baidhawy, Zakiyuddin. 2007. "Building Harmony and Peace through Multiculturalist Theology-Based Religious Education: An Alternative for Contemporary Indonesia" *British Journal of Religious Education*, 29:1, pp. 21.

- Bielefeldt, Heiner. 2013. "Misperceptions Freedom of Religion or Belief" *Journal of Human Right Quarterly*, 35, No. 1. pp. 33-68.
- Bustaman-Ahmad, Kamaruzzaman. 2011. "Contemporary Islamic Thought in Indonesia and Malay World: Islam Liberal, Islam Hadhari, and Islam Progresif", *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 5, (1) June, pp. 91.
- Carmody, Brendan. 2010. "Interreligious Education and the Question of Truth" in Kath Engebretson, etl., *International Handbooks of Religion and Education*, (Springer Science+Business Media B.V., pp. 50.
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. pp. 6.
- Davies, Tanya. 2017. "Religious Education and Social Literacy: the 'white elephant' of Australian Public Education" *British Journal of Religious Education*, pp. 8.
- Dubbun Hakim, Abdul. 2006. "Islam, Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme" dalam *menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Madjid*, eds., Abdul Halim. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. pp. 14.
- Endraswara, Suwardi. 2010. *Kearifan Lokal di Yogyakarta*. Yogyakarta: Penelitian Pemda DIY.
- Fitri Kusumayanti. 2007. "Penggunaan Bahasa Ugi Sebagai Media Komunikasi dalam Interaksi Sosial pada Kelompok Etnis Bugis di Desa Punggur Kecil Sungai Kakap Kabupaten Pontianak", *Tesis*. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak. pp. 85.
- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan: Pendidikan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. pp. 83.
- Gordon. Sheila C. dan Benjamin Arenstein. 2017. "Interfaith Education: A New Model for Today's Interfaith Families", (Springer Science+Business: *Media Dordrecht and UNESCO Institute for Lifelong Learning*, pp. 192.
- Gustina, Nelvia. 2002. "Proses Sosial Antar Kelompok Etnis di Pemukiman Transmigrasi Spontan (Kasus pada Pakon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung) dalam Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

- Hafid, Abdul. 2016. Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, *Jurnal "Al-Qalam*, Volume 22 Nomor 1 Juni. pp. 257-268.
- Haryono, M. Yudhie. 2005. *Melawan dengan Teks*. Jogjakarta: Resist Book. pp.1.
- Ismail Suardi Wekke. 2016. Harmoni Sosial dalam Keberagaman dan Keberagamaan Masyarakat Minoritas Muslim Papua Barat, *Volume 10*, (2), Desember. pp. 295 – 312.
- Islam, Nazia. Tiffany Steinwert, and Diane Swords. 2014. “3Dialogue in Action: Toward a Critical Pedagogy for Interfaith Education.” *The Journal of Interreligious Studies Newton* 13: pp. 4-10.
- Isnain, Muhammad 2018. “Inkonsistensi Pendidikan Agama Islam (Masalah, Solusi dan Re-Orientasi)”
- Khalid Masud, Muhammad. 2002. “the Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions” in *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict*, eds., Sohail H. Hashmi (The United of America Princeton University Press, pp. 136.
- K. Kay. William dan Leslie J. Francis. 1997. *Religion in Education*. Herefordshire: Fowler Wright Books, pp. 258
- Kali>n, Ibrahim. 2009. “Masa>dir al-Tasa>muh}, wa’adam al-Tasa>muh fi al-Islam”, *Majalah Adyan*: pp. 26-32.
- <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/inkonsistensipendidikanagamaislam.pdf> Diakses tanggal 2 Agustus 2018.
- Leirvik, Oddbjørn. 2014. “Interreligious Studies: A Relational Approach to the Study of Religion.” *The Journal of Interreligious Studies, Issue 13, Winter 2014*. pp. 16.
- Lindsay, Jennifer. 2007. Intercultural Expectations: I La Galigo in Singapore, *TDR (1988-) Vol. 51*, (2) Summer. pp. 60-75.
- Mariam, Sharan B. 1998. *Qualitative Research and Case Study Application in Education*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers. pp. 5.
- Madjid, Nurcholis dkk. 2005. *Fikhi Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Paramadina: Jakarta.
- Malik Thoha, Anis. 2005. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif. pp. 263-265.

- Marzuki, M. L., 1995. *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar* (Sebuah Telaah Filsafat Hukum). Makassar: Hasanuddin University Press. pp. 17.
- Mattulada. 1983. "Islam di Sulawesi Selatan" dalam *Agama dan Perubahan Sosial* ed. Taufik Abdullah. Jakarta: Rajawali pp. 235.
- Meike Watzlawik. 2012. "Cultural Identity Markers and Identity as a Whole: Some Alternative Solutions", *Culture and Psychology*, Vol. 18, (2). pp. 253-260.
- Mujani, Saipul. 2007. *Muslim Demokrat: Islam dan Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, pp. 118.
- Munawar-Rachman, Budhy. 2001. *Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina, Muslimin. 2018. *Islam dan Pendidikan Pluralisme*. <http://channelnahdliyin.com>. Diakses tanggal 21 Februari
- Naim, Ngainun dan Ahmad Sauqi. 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, pp.176-182.
- Nottingham, Elizabeth K. 1979. mengatakan "sejarah mencatat Margaret M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory* (New York: Macmillan Publishing Co. Inc. pp. 15-30 dan 65-90.
- Parekh, Bikhu. 2018. "Rethinking Multiculturalism" *Cultural Diversity and Political Theory*. <http://www.educationworld.com>. diakses tanggal 21 Februari.
- Patmawati. 2014. "Bugis Kalimantan Barat Abad XX-XXI, *Disertasi*. UIN, Makassar.
- Patmawati. 2016. Peranan Nilai Philosofi Bugis Terhadap Proses Pengislaman Kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, Volume 6 (2) September. pp. 184.
- Pelras, Christian. 2005. "Budaya Bugis: Sebuah Tradisi Modernitas" dalam *Tapak-tapak Waktu Kebudayaan, Sejarah, dan Kebudayaan Sosial di Sulawesi Selatan*, peny. Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni, Makassar: Ininnawa.
- Putnam, Robert. 1993. *Making Democracy work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princenton: NJ: Princeton Universuty Press. pp. 170.

- R. Shah, Sheetal. 2006. *The Impact of Acculturation and Religion on Intergenerational Family Conflict for Second Generation Asian Indian Americans*, Tesis. Carbondale: Southern Illinois University.
- Raharjo Jati, Wasisto. 2013. "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan", *Jurnal Walisongo*, 21, (2), pp. 393-416.
- Rahman, Nurhayati. 2006. *Cinta, Laut dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo* Makassar: La Galigo Press. 387.
- Ramble, C. 2008. *The Navel of the Demoness: Tibetan Buddhism and Civil Religion in Highlight Nepal*. Oxford: Oxford University Press.
- Rozak, Abdul. 2015. "Political Thoughts and Socio-Cultural Nationalism Ideologies of Nurcholis Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia", *Asian Social Science International Journal*, 11, No. 27. pp. 142-145.
- Rais, Za'im. 1994. "The Minangkabau Traditionalists' Response to The Modernist Movement", *disertasi*, Montreal: McGill University.
- Saidi, Saleh et al., eds., 2002. *Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali*. Denpasar: MUI.
- Sila, Adlin. 2011. "Memahami Spektrum Islam di Jawa", *Indonesian Journal for Islamic Studies Studia Islamika*, Vol. 18, (3). pp. 611.
- Stevens, S. 1997. "*Annapurna Conservation Area: Empowerment, Conservation and Development in Nepal*" dalam Stevens, S. (ed.), *Conservation Through Cultural Survival*, Washington: Island Press. pp. 237–261.
- Todd, Stephen dan Andrew Steele. 2006. "Modelling a Culturally Sensitive Approach to Fuel Poverty", *Structural Survey*, Vol. 24, (4). pp. 300-310.
- Ulfa, Maria. 2013. "Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholish Madjid", *Jurnal Kalimah*, Vol. 11, (2). pp. 237.
- Warren, Mark E. 1999. *Democracy and Trust*. Cambridge: Cambridge University Press. pp.3.
- Weige, George. 1992. "Religion and Peace an Argument Complexified" dalam Syeryl Brown dan Kimber Schaub eds., *Resolving Third World Conflict: Challenge for New Era*. Washinton DC: US Institute of Peace Press, pp. 173.

- West, P. 2006. Conservation is Our Government Now: *The Politics of Ecology in Papua New Guinea*, Durham: Duke University Press.
- Yunus, Y. (2020). KEARIFAN LOKAL BUDAYA BUGIS DAN PLURALISME (Studi Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi di Kota Palopo Tahun 2017-2020).
- , Nurseha, M. (2020). Culture of Siri' in Learning Akidah Akhlak in MAN Suli Luwu District Budaya Siri' dalam. *JIEBAR : Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, 01, 107–120.
- . (2019). PLURALISME AGAMA DALAM PENDIDIKAN. *Prosiding Seminar Nasional, Harmonisasi Keberagaman Dan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial*, 96–102.
- S. (2020). MODEL PENDIDIKAN BUDAYA BUGIS DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI PLURALISME. *JURNAL PENELITIAN*, 14(2), 217–248.